

PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA

(Prospects of Redenomination Implementation in Indonesia)

Sony Hendra Permana

P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, 10270
Email: sony.hendra@dpr.go.id

Naskah diterima: 25 Agustus 2014

Naskah direvisi: 28 Agustus 2014

Naskah diterbitkan: 29 Juni 2015

Abstract

Rupiah denomination is the third largest in the world after Zimbabwe and Vietnam. For some parties, this denomination poses some problems such as economic inefficiencies, increase in expense accounting, cost for application development, and the low value of the Rupiah in the international community. This paper aims to look at the readiness of Indonesia in the redenomination program and its effects on people's lives. This study uses descriptive method by utilizing secondary data and existing publications. The urgency of the implementation of redenomination in Indonesia is based on the inefficiency of economy, the technical constraints on the operational business activities and the urgency to support the national economy in entering the era of the ASEAN economic community. Indonesian macro economic indicators are considered strong and good enough to support the implementation of redenomination. On the one hand, Rupiah redenomination is expected to provide positive benefits such as improving the credibility of Rupiah, saving the cost of money-printing, simplifying financial transactions, and improving economic efficiency. On the other hand, the government and Central Bank (Bank of Indonesia) must also be vigilant about the negative impacts of redenomination such as inflation, rising costs of production, psychological effect, and disputes among business players.

Keywords: redenomination, rupiah, currency, efficiency

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan redenominasi di Indonesia dan menjelaskan bagaimana kesiapan fundamental makroekonomi Indonesia dalam menghadapi program redenominasi serta dampak yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang sudah ada sebelumnya. Urgensi dilaksanakannya redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Indikator makroekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya redenominasi. Redenominasi diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi negara, pelaku usaha dan masyarakat. Bagi negara redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah. Bagi pelaku usaha redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi. Bagi masyarakat, redenominasi dapat mempermudah dalam bertransaksi, mengurangi resiko kerusakan uang dan mendukung proses belajar dan mengajar pada pendidikan dasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu mewaspadai terjadinya risiko akibat redenominasi, yaitu inflasi, penambahan pengeluaran negara, penolakan sebagian masyarakat dan penambahan biaya produksi, efek psikologi, dan potensi perselisihan antar pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci: redenominasi, rupiah, mata uang, efisiensi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat baik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi, bahkan menjadi salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tingkat inflasi juga terjaga dengan baik, nilai tukar rupiah yang tetap stabil, dan akumulasi jumlah cadangan devisa yang mencukupi kebutuhan transaksi ekonomi. Bahkan persepsi masyarakat dunia terhadap kesinambungan perekonomian Indonesia juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari peringkat *credit rating*

Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional yang semakin membaik dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk memelihara kesinambungan perkembangan perekonomian nasional tersebut, maka ketersediaan uang rupiah dengan jumlah yang cukup dan dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam kehidupan masyarakat saat ini, fungsi uang selain sebagai alat tukar atau alat pembayaran, juga berfungsi sebagai penyimpan nilai (*medium of exchange*) dan sebagai satuan perhitungan (*unit of account*) (Lipsey, Steiner, Purvis, and Courant, 1995). Namun demikian, fungsi uang sebagai alat

pembayaran masih merupakan hal yang utama seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat untuk memegang uang kartal. Selama periode bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri tahun 2014 ini, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) mencapai Rp580,3 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 14,5 persen dibandingkan pada tahun lalu (Siahaan, 2014). Bahkan menjelang awal Ramadhan, Bank Indonesia mencatat uang kartal yang dipegang oleh masyarakat (*currency outside bank* atau COB) mencapai Rp385,2 triliun (pangsa 85 persen), sisanya sebesar Rp67,9 triliun (pangsa 15 persen) berada di khazanah perbankan (*cash in vault* atau CIV) (Siahaan, 2014).

Seiring dengan pencapaian kinerja ekonomi nasional dan preferensi masyarakat dalam memegang uang kartal yang cukup tinggi ini, muncullah ide untuk melakukan program redenominasi dari pemerintah. Pada tanggal 11 Juni 2013, Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan No. R-25/Pres/06/2013 perihal RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Alie, 2013). Selanjutnya DPR RI menindaklanjutinya dengan membentuk Pansus Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah pada tanggal 25 Juni 2013 (Kurniawan, 2013). Ide tersebut muncul karena saat ini rupiah merupakan mata uang dengan jumlah digit nol terbanyak ketiga setelah Zimbabwe dan Vietnam. Digit yang terlalu banyak ini dinilai berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi di masa yang akan datang. Inefisiensi akan terjadi pada proses *input* data, pengelolaan *database*, pelaporan data dan penyimpanan data. Masyarakat juga akan menghadapi kerumitan perhitungan dalam transaksi ekonomi yang dapat berakibat terjadinya kekeliruan dan memakan waktu transaksi yang lebih lama (Purwanto, 2013). Hal lain yang mungkin akan terjadi adalah adanya kebutuhan untuk menyesuaikan alat-alat transaksi elektronik dan sistem teknologi informasi, khususnya pada sektor penyedia jasa keuangan sehingga akan menimbulkan biaya perbaikan infrastruktur yang sangat besar.

Sebenarnya jumlah digit yang banyak pada mata uang rupiah ini bersumber dari akumulasi kejadian krisis di tahun-tahun sebelumnya dan laju inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bahkan nilai rupiah pernah mencapai titik terendahnya pada masa krisis tahun 1998, mencapai Rp17.000 per USD pada tanggal 22 Januari 1998, atau terdepresiasi lebih dari 80 persen sejak rezim nilai tukar mengambang pada tanggal 14 Agustus 1997 (Suruji *dkk*, 1998). Pemerintah beranggapan bahwa kondisi digit rupiah yang terlalu banyak ini kurang mampu mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia yang sebenarnya sudah baik (Metrotvnews.com, 2013).

B. Permasalahan

Ide untuk melakukan redenominasi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari praktik penyederhanaan digit mata uang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, seperti di restoran, hotel, dan pasar tradisional. Penyederhanaan dilakukan dengan langsung menghilangkan 3 digit angka nol di belakang atau menuliskan 3 digit angka nol di belakang lebih kecil dibandingkan angka di depannya. Dengan demikian, secara tidak langsung masyarakat telah menunjukkan bahwa penggunaan denominasi besar pada mata uang rupiah cukup merepotkan. Pihak-pihak yang setuju dengan ide redenominasi beranggapan bahwa denominasi rupiah saat ini akan menimbulkan beberapa potensi kerugian baik bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun otoritas yang berwenang. Potensi permasalahan yang timbul adalah terjadinya inefisiensi pencantuman harga-harga barang dengan denominasi besar sehingga akan menimbulkan beban usaha tambahan. Selain itu, dapat meningkatkan beban pencatatan transaksi dan pembukuan dalam hal waktu pencatatan yang dapat berpotensi terjadi kekeliruan. Pada transaksi elektronik akan meningkatkan penggunaan memori penyimpanan data sehingga di masa mendatang dibutuhkan dilakukannya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem pembayaran nasional, untuk menampilkan dan melakukan proses perhitungan dengan jumlah digit yang banyak yang pada akhirnya dibutuhkan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran nontunai dengan biaya yang sangat besar. Denominasi besar juga akan menimbulkan kendala-kendala teknis dalam mengakomodir pencatatan nilai pada peralatan sehari-hari, seperti mesin kasir, pompa bensin, argometer taksi, kalkulator dan lain-lain. Hal ini juga akan mengakibatkan nilai rupiah dipersepsikan sangat rendah dalam pergaulan internasional.

Bagi bank sentral penggunaan denominasi besar akan menimbulkan inefisiensi dalam tugasnya melakukan peredaran mata uang. Denominasi besar akan meningkatnya penggunaan uang kertas sehingga akan menyebabkan biaya pencetakan uang yang tidak efisien karena masa edar uang kertas jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa edar uang koin. Saat ini pangsa uang kertas yang diedarkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa uang logam yang diedarkan. Pangsa uang kertas mencapai 98,8 persen dari total uang kartal yang diedarkan. Sampai dengan April 2014, Bank Indonesia telah menerbitkan uang kertas sebesar Rp449,42 triliun dan uang logam Rp5,4 triliun (Waas, 2014a).

Di sisi lain, bagi pihak-pihak yang tidak setuju dengan ide redenominasi menyatakan bahwa urgensi dilakukannya redenominasi belum ada,

bahkan pelaksanaan redenominasi akan berpotensi menimbulkan permasalahan baru (Karimi, 2014). Permasalahan yang mungkin timbul, antara lain inflasi yang tinggi akibat adanya pembulatan ke atas oleh pelaku ekonomi. Selain itu, redenominasi dikhawatirkan akan menimbulkan biaya tinggi akibat dari proses legislasi, sosialisasi, serta adanya kebutuhan pencetakan uang baru.

C. Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan redenominasi di Indonesia. Selain itu juga tulisan ini mencoba menjelaskan bagaimana kesiapan fundamental makroekonomi Indonesia saat ini dalam menghadapi program redenominasi serta dampak yang akan ditimbulkannya.

II. KERANGKA TEORI

A. Pengertian Redenominasi

Redenominasi rupiah adalah pemotongan nominal yang dilakukan pada sebuah mata uang yang tanpa mengurangi jumlah nilainya. Prinsip yang dilakukan pada saat perubahan hanyalah pada penyebutan nama (Redenominasirupiah.com, 2013a). Pengertian lain menyebutkan bahwa redenominasi adalah suatu proses dimana mata uang baru menggantikan mata uang lama dengan suatu rasio tertentu (Dogarawa, 2007). Redenominasi juga dapat didefinisikan sebagai penyederhanaan jumlah digit pada denominasi atau pecahan mata uang tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukar mata uang tersebut terhadap harga barang dan/atau jasa. Secara lebih sederhana, redenominasi adalah penyederhaan penyebutan atau penulisan denominasi mata uang suatu negara.

Redenominasi sebenarnya hanyalah mengubah tampilan nilai mata uang, sehingga tidak akan mengakibatkan menurunnya nilai relatif (daya beli) uang terhadap barang dan jasa. Sebagai contoh adalah jika harga bahan bakar premium saat ini sebesar Rp6.500 per liter, maka setelah dilaksanakannya redenominasi harganya menjadi Rp6,5 per liter. Selain itu, redenominasi tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan transaksi ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan wibawa rupiah di mata uang asing. Namun demikian, kita tidak boleh terjebak dalam “jebakan nominal”, karena wibawa rupiah sesungguhnya bukan karena nilai yang besar, melainkan karena nilainya yang stabil (Thalo, 2010).

Dari hasil studi, beberapa alasan yang dibuat oleh negara-negara yang melakukan redenominasi mulai periode tahun 1960 sampai tahun 2003 adalah *pertama*, redenominasi dapat meningkatkan

kredibilitas pemerintah khususnya komitmen untuk memelihara tingkat inflasi yang rendah. Hal ini terjadi pada negara-negara yang sebelumnya pernah mengalami masa hiperinflasi. *Kedua*, redenominasi merupakan bagian dari program stabilisasi pemerintah dan biasanya dilakukan setelah periode inflasi tinggi. Tingkat inflasi yang terus menurun akan meningkatkan peluang terjadinya redenominasi (Mosley, 2005). Studi lain juga mengatakan bahwa kebijakan redenominasi mata uang, khususnya di negara-negara berkembang, dapat menghasilkan beberapa indikator makroekonomi yang positif (Somoye and Onakoya, 2013).

Sesungguhnya Indonesia pernah melakukan redenominasi rupiah pada tanggal 13 Desember 1965 (Bank Indonesia, 2005). Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 dengan menghilangkan tiga digit mata uang rupiah lama, atau Rp1 uang baru sama dengan Rp1.000 uang lama. Penerbitan uang rupiah baru tersebut ditujukan untuk mempersiapkan terwujudnya kesatuan moneter bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Provinsi Irian Barat. Namun pelaksanaan program redenominasi tersebut mengalami kegagalan karena dilaksanakan pada saat Indonesia sedang mengalami inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah secara kuantitatif tidak berhasil mencapai target kebijaksanaan, yaitu menutup hutang pemerintah kepada BI dan mengurangi jumlah uang beredar.

Untuk menghindari kegagalan yang sama pada tahun 1965, maka pelaksanaan program redenominasi saat ini harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Beberapa syarat yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan redenominasi dilakukan agar kebijakan tersebut dapat berhasil adalah terjaganya stabilitas makroekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi yang stabil dan dalam tren menurun, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, serta stabilitas nilai tukar. Selanjutnya, adanya dukungan seluruh lapisan masyarakat, landasan hukum yang kuat, kondisi sosial politik yang kondusif, penentuan waktu (*timing*) yang tepat, serta dukungan stabilitas kondisi perekonomian internasional.

Hasil kajian yang dilakukan oleh BI tentang redenominasi dengan menghilangkan 3 digit nol di belakang, maka tindakan redenominasi tersebut baru dapat dilakukan kembali setelah 50 tahun. Sementara, jika redenominasi menghilangkan 4 digit nol di belakang, maka akan dilakukan redenominasi kembali setelah 80-90 tahun lagi (Bank Indonesia, 2014b). Dalam hal proses pencetakan uang, redenominasi tidak akan memberikan beban yang signifikan untuk mencetak uang baru. Penambahan yang harus dilakukan dalam rangka redenominasi hanya

perubahan pada desain tampilan uang, selebihnya jumlah pencetakan uang baru untuk menggantikan uang lama berjalan seperti proses normal.

Pada saat ini, rata-rata pemusnahan uang lusuh yang dilakukan oleh BI setiap tahunnya adalah sebesar 30 persen untuk semua level uang. Sebagai contoh pada tahun 2013, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) sebesar Rp420,9 triliun, uang di kasan bank sebesar 15,8 persen dari Rp 420 triliun tersebut, sementara jumlah uang yang dimusnahkan pada tahun tersebut sebesar Rp105,3 triliun (Waas, 2014b). Pelaksanaan redenominasi hanya akan menimbulkan biaya yang cukup besar pada biaya edukasi terhadap publik. Kegiatan edukasi akan sangat beragam, disesuaikan dengan latar belakang masyarakat baik dilihat dari aspek pendidikan, usia, dan tingkat ekonomi. Untuk itu, BI harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, khususnya media massa agar program redenominasi ini tidak berpotensi menimbulkan kekacauan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan kerusakan akan lebih besar (Thalo, 2010). Dukungan dari masyarakat terhadap program redenominasi ini juga sangat penting. Selain itu, dukungan politik dari DPR RI juga diperlukan untuk menciptakan kondisi sosial politik yang kondusif (Priyono, 2013).

Bagi perbankan, masa persiapan yang dibutuhkan oleh kalangan perbankan untuk menghadapi perubahan berdasarkan hasil *assessment* BI terhadap beberapa bank besar nasional, menyebutkan bahwa persiapan yang diperlukan kalangan perbankan untuk melakukan perubahan sistem *Information Technology* (IT) dalam rangka redenominasi berkisar antara 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun. Namun secara garis besar perubahan sistem tidak akan terjadi secara masif. Sebagai contoh dalam mesin ATM, perbankan hanya perlu melakukan perubahan tampilan saja, karena bentuk dan ukuran uang akan sama baik pecahan uang lama maupun uang baru (Bank Indonesia, 2014b).

B. Perbedaan Redenominasi dengan Sanering

Rencana program redenominasi yang diajukan oleh pemerintah ke DPR RI beberapa waktu yang lalu mendapatkan beberapa tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun yang menolak usulan tersebut. Beberapa pihak yang menolak mengkhawatirkan pelaksanaan redenominasi menimbulkan trauma sebagian masyarakat pada masa lalu karena redenominasi dianggap sebagai program sanering yang pernah dilakukan di masa lalu, terutama kelompok usia

Tabel 1. Perbedaan Redenominasi dengan Sanering

Aspek	Redenominasi	Sanering
Pengertian	Redenominasi rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya Rp1.000 menjadi Rp1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.	Sanering rupiah adalah pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
Dampak bagi Masyarakat	Tidak ada kerugian karena daya beli tetap.	Menimbulkan kerugian karena daya beli turun drastis.
Tujuannya	Menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakukan transaksi. Tujuan selanjutnya mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional.	Mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi)
Nilai uang terhadap barang	Nilai uang tidak berubah karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.	Nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil karena yang dipotong adalah nilainya.
Kondisi saat dilakukan	Dilakukan saat kondisi makroekonomi stabil, ekonomi tumbuh, dan inflasi terkendali.	Dilakukan dalam kondisi makroekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi)
Masa Transisi	Dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.	Tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.
Contoh untuk harga 1 liter bensin seharga Rp4.500 per liter	Bila terjadi redenominasi, tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin, karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru).	Bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.

Sumber: www.rendenominasirupiah.com.

masyarakat yang pada masanya turut mengalami penurunan nilai uang tanpa dibarengi penurunan harga-harga secara proporsional.

Sanering memiliki pengertian pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang, sementara hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun (Redenominasirupiah.com, 2013b). Untuk mencegah salah pengertian tersebut oleh masyarakat, pada Tabel 1 disajikan perbedaan antara redenominasi dengan sanering.

C. Pembelajaran dari Negara-Negara Lain

1. Negara-Negara yang Berhasil Melaksanakan Redenominasi

a. Turki

Bank Sentral Turki melakukan kebijakan redenominasi pada tahun 2005 untuk dua alasan. *Pertama*, alasan teknis mengingat banyaknya angka nol pada mata uang memperumit perhitungan transaksi keuangan. *Kedua*, redenominasi dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas perekonomian. Keberadaan mata uang (*bank note*) sebesar 20.000.000, merupakan hal yang sangat tidak wajar di perekonomian internasional, dan telah dianggap mengakibatkan efek yang negatif pada kredibilitas perekonomian Turki. Penyederhanaan mata uang menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat Turki baik di sektor riil maupun sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal dan sistem pembayaran (Serdengecti, 2004). Redenominasi di Turki ini dinilai mengalami keberhasilan karena dilakukan pada saat kondisi fundamental perekonomian Turki cukup kuat dengan pertumbuhan yang baik, tren inflasi yang menurun, nilai tukar yang stabil, dan defisit anggaran pemerintah yang terus mengalami penurunan. Setelah dilaksanakannya redenominasi,

meskipun pertumbuhan mengalami pelemahan, namun inflasi menunjukkan tren penurunan dan nilai tukar tetap stabil. Pada Tabel 2 disajikan data indikator makroekonomi Turki sebelum dan sesudah pelaksanaan redenominasi.

Keberhasilan program redenominasi di Turki ini tidak terlepas pula dari perencanaan program yang matang dan terstruktur dengan baik. Tahapan yang dilakukan oleh Turki dalam melaksanakan kebijakan redenominasi adalah, *pertama*, tanggal 1 September sampai dengan 30 Desember 2004 dilakukan sosialisasi secara menyeluruh selama 4 bulan. *Kedua*, tanggal 30 September 2004 infrastruktur *payment system* dan *information technology* telah siap. *Ketiga*, tanggal 31 Desember 2004 Undang-Undang Redenominasi diberlakukan dan dilakukan konversi seluruh rekening dari uang lama (TL) ke uang baru (YTL) dan dimulai peredaran mata uang baru. *Keempat*, tanggal 1 Januari 2005 dilakukan pengedaran mata uang baru. *Kelima*, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 mata uang lama dan baru masih beredar dan berlaku. *Keenam*, tanggal 1 Januari 2006 kata baru (Yeni) pada YTL dihilangkan, redenominasi berjalan dengan baik (Tarhan, 2006).

b. Rumania

Rumania melakukan redenominasi pada tanggal 1 Juli 2005 dengan menghilangkan 4 digit mata uangnya. Alasan utama Rumania melakukan redenominasi yaitu adanya keinginan untuk bergabung dengan Euro. Rumania melakukan persiapan yang sangat terencana untuk memenuhi keinginannya dalam bergabung dengan mata uang tunggal Euro tersebut. Tahapan yang dilakukan oleh Rumania dalam melaksanakan kebijakan redenominasi adalah, *pertama*, tanggal 14 Juli 2004 pemberlakuan undang-undang mengenai redenominasi. *Kedua*, tanggal 1 Maret 2005 sampai

Tabel 2. Indikator Makroekonomi Turki Sebelum dan Sesudah Redenominasi 1 Januari 2005

Indikator Makroekonomi	Sebelum Redenominasi		Sesudah Redenominasi		
	2003	2004	2005	2006	2007
Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,27	9,37	8,40	6,89	4,45
Inflasi (persen)	18,36	9,32	10,53	9,65	8,39
PDB nominal (miliar USD)	304,59	393,04	483,99	529,93	655,88
Defisit fiskal (persen)	-11,30	-7,10	-2,00	0,70	NA*
Neraca berjalan/PDB (persen)	-1,65	-2,58	-3,41	-4,21	-4,4
Nilai tukar nominal (TL/USD)	1,40	1,34	1,35	1,41	1,17
Cadangan devisa (juta USD)	33.793	35.480	50.402	60.710	73.156
Suku bunga kebijakan (persen)	43,00	38,00	23,00	27,00	25,00

Sumber: www.imf.org, 2014.

Keterangan: *Data tidak tersedia.

dengan 30 Juni 2006 pemberlakuan dua harga (*dual pricing*) mata uang lama dan baru. *Ketiga*, tanggal 1 Juli 2005 uang baru (kertas dan logam) diedarkan. *Keempat*, tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 31 Desember 2006 peredaran dua mata uang dan penarikan gradual uang lama. *Kelima*, sejak tanggal 1 Januari 2007 uang lama tidak berlaku. *Keenam*, sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, uang lama dapat ditukar dengan uang baru (Isarescu, 2004).

Sebelum dilakukan redenominasi pada tahun 2005 perekonomian Rumania menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang cukup signifikan, yaitu tingkat inflasi yang terus mengalami penurunan. Otoritas fiskal berhasil menekan *budget deficit* dari rata-rata 3 persen menjadi hanya sekitar 1,1 persen dari GDP di tahun 2004. *National Bank of Rumania* (NBR) sebagai otoritas moneter terus melakukan pengetatan kebijakan moneter dengan mempertahankan suku bunga (*policy rate*) pada level 17 persen pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2004 meningkat cukup pesat yaitu sebesar 8,4 persen. Nilai tukar mata uang lama (ROL) per USD juga cenderung stabil dari tahun ke tahun. Adapun data makroekonomi Rumania adalah sebagai berikut:

2. Negara-Negara yang Gagal Melaksanakan Redenominasi

a. Brazil

Brazil merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang telah beberapa kali melakukan redenominasi. Brazil tercatat telah melakukan 6 kali redenominasi yaitu tahun 1967 (hilang 3 nol), tahun 1970 (hilang 3 nol), tahun 1986 (hilang 3 nol), tahun 1989 (hilang 3 nol), 1993 (hilang 3 nol), dan 1994 (hilang 3 nol) (Serdengecti, 2004). Pada pelaksanaan program redenominasi di periode awal tahun 1990an, dinilai mengalami kegagalan. Kegagalan disebabkan kondisi fundamental perekonomian Brazil sesungguhnya sedang dalam

kondisi yang kurang baik dan pemerintah dianggap tidak mampu dalam mengelola indikator-indikator makroekonominya. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan perekonomian hanya tumbuh pada kisaran 0-1 persen pada periode tahun 1990-1992. Selain itu, Pemerintah Brazil mengambil kebijakan defisit fiskal untuk membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan pengeluaran tersebut bukan berasal dari penerimaan pajak tetapi dengan mencetak uang (*money creation*) sehingga terjadi kondisi ketidaksesuaian pertumbuhan jumlah uang beredar dengan kapasitas perekonomiannya. Setelah melakukan redenominasi, tingkat inflasi masih tetap tinggi meskipun pemerintah telah melakukan stabilisasi perekonomian (Bank Indonesia, 2014b).

b. Rusia

Rusia mengalami kegagalan dalam melaksanakan program redenominasi di tahun 1998. Program redenominasi tersebut berencana untuk menghilangkan tiga angka nol dari mata uangnya. Redenominasi bertujuan untuk meyakinkan publik bahwa krisis ekonomi Rusia telah berlalu ditandai dengan penurunan inflasi yang sangat besar dari tahun ke tahun, mulai dari 875 persen di tahun 1993 menjadi 200 persen di tahun 1995, dan akhirnya mencapai 15 persen di tahun 1997 (Dogarawa, 2007). Namun demikian, penentuan *timing* yang kurang tepat membuat pelaksanaan redenominasi di Rusia mengalami kegagalan, di mana stabilitas perekonomian internasional berada dalam situasi yang tidak mendukung. Setelah dilakukan redenominasi terjadi tekanan terhadap rubel sebagai dampak dari *spillover* jatuhnya mata uang Asia sehingga menyebabkan pemerintah tidak mampu untuk membayar utang luar negerinya. Hal ini memperburuk situasi karena nilai tukar rubel terus terdepresiasi sehingga menyebabkan kenaikan tingkat inflasi setelah dilakukan redenominasi. Negara tersebut kembali mengalami inflasi yang

Tabel 3. Indikator Makroekonomi Rumania Menjelang Redenominasi 1 Juli 2005

Indikator Makroekonomi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pertumbuhan ekonomi (persen)	2,10	5,70	5,10	5,0	8,40	4,17
Inflasi (persen)	45,67	34,47	22,54	15,26	11,88	8,99
PDB nominal (miliar USD)	37,05	40,18	45,82	59,51	75,49	98,91
Defisit fiskal/PDB (persen)	-3,7	-3,5	NA	-3,08	-1,12	-0,76
Neraca berjalan/PDB (persen)	-3,91	-4,4	-3,3	-5,70	-8,40	-8,70
Nilai tukar nominal (RON/USD)	2,17	2,91	3,31	3,32	3,26	2,91
Cadangan devisa (juta EUR)	5.205	7.231	8.051	8.252	1.315	1.936
Suku bunga kebijakan (persen)	NA	NA	NA	21,25	17,00	7,50

Sumber: www.imf.org, 2014.

sangat tinggi pada tahun 1999, yaitu sebesar 86 persen (Latif, 2011).

III. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif. Metode ini bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan topik tulisan ini (Suryabrata, 2013).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan penelusuran literatur dan *review* terhadap studi terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan redenominasi seperti hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang mendukung tulisan ini. Beberapa data yang digunakan dalam *paper* ini bersumber dari *International Monetary Fund* (IMF), Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Studi literatur juga dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, karangan ilmiah, surat kabar, *website*, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Dibutuhkan Redenominasi

Pecahan mata uang rupiah saat ini merupakan pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia setelah Zimbabwe dan Vietnam. Untuk kawasan Asia Tenggara, pecahan Rp100.000 saat ini merupakan pecahan uang terbesar kedua setelah Dong Vietnam dengan denominasi 500.000. Pecahan uang rupiah yang cukup besar ini beberapa waktu belakangan ini mulai menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi masyarakat, khususnya dalam melakukan transaksi keuangan. Untuk itu pemerintah, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, mengemukakan perlunya dilakukan penyederhanaan mata uang rupiah. Adanya kebutuhan dilaksanakannya redenominasi di Indonesia didasari atas beberapa aspek, yaitu:

1. Inefisiensi perekonomian

Denominasi rupiah yang cukup besar saat ini, dinilai telah menimbulkan inefisiensi dalam perekonomian yang terkait dengan *pertama*, menimbulkan waktu dan biaya transaksi cukup besar. Pecahan uang yang terlalu besar ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi. Transaksi yang menggunakan nominal besar secara otomatis akan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan nominal kecil. Selain itu juga biaya transaksi juga akan lebih besar karena waktu transaksinya lebih lama. *Kedua*,

kebutuhan pengembangan infrastruktur untuk sistem pembayaran nontunai di masa mendatang dengan biaya yang cukup signifikan. Sebagai informasi bahwa saat ini kemampuan komputer hanya dapat mengakomodir 15 digit angka saja, sementara nilai APBN telah mencapai 16 digit. Tidak menutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan pelaku usaha, khususnya penyedia jasa keuangan perlu melakukan penyesuaian perangkat lunak dan keras sistem akuntansi untuk mengakomodir kebutuhan penggunaan lebih dari 16 digit dalam transaksi keuangan jika tidak dilakukan redenominasi. *Ketiga*, meningkatkan biaya pengadaan uang baru dengan pecahan yang lebih besar untuk mengakomodasi kebutuhan pembayaran tunai yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan denominasi besar, maka penggunaan uang kertas akan jauh lebih tinggi dengan penggunaan uang logam, sementara biaya pencetakan uang kertas jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pencetakan uang logam yang memiliki masa edar lebih lama.

2. Kendala teknis pada operasional kegiatan usaha

Dalam kehidupan sehari-hari, kendala teknis pada operasional oleh pelaku usaha mudah untuk kita temui. Sebagai contoh pada pompa bensin yang hanya memiliki 6 digit angka saja sehingga petugas akan menemui kesulitan jika transaksi melebihi dari Rp1.000.000. Meskipun di beberapa pompa bensin mengakali dengan menambahkan angka nol dengan kertas pada meterannya, namun hal ini tetap menjadi permasalahan yang akan terus dihadapi dengan penggunaan denominasi besar. Hal yang sama juga terjadi pada argo taksi yang hanya memiliki 6 digit saja. Kendala teknis lainnya adalah dengan denominasi besar maka akan membutuhkan media penyimpanan yang besar, selain itu pula dalam pengolahan data untuk keperluan statistik juga akan memakan proses yang lebih lama karena data yang digunakan sangat besar. Kendala lain yang ditemui adalah pelaku usaha akan kesulitan dalam menyajikan data keseluruhan dalam laporan keuangannya. Denominasi besar juga akan menimbulkan potensi kesalahan manusia (*human error*) dalam pemasukan/pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data akan menjadi lebih besar.

Kendala teknis juga terjadi pada transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Nota dan RAPBN Tahun 2015, diketahui bahwa pendapatan negara tahun 2014 ini diperkirakan mencapai Rp1.635 triliun (Nota Keuangan dan RAPBN, 2014), yang berarti telah mencapai 16 digit. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh pemerintah-pun diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Mengingat

Tabel 4. Perbandingan Indikator Makroekonomi dan Pecahan Mata Uang Negara ASEAN Tahun 2013

Negara	Kurs (1/USD)/ Sept 2014	PDB Harga Berlaku (Miliar USD)*	PDB/Kapita (USD)*	Inflasi (Persen)*	Denominasi Tertinggi Mata Uang	Current Account Balance (Persen dari PDB)*	Defisit Fiskal (Persen dari PDB)*	Cadangan Devisa (Miliar USD)
Indonesia	11.769,00	868,53	3.509,82	8,10	100.000	-3,30	-2,23	99.387
Singapura	1,25	295,74	54.775,53	2,01	10.000	18,39	6,76	273.065
Malaysia	3,18	312,43	10.547,97	3,22	100	3,80	-4,61	136.297**
Thailand	32,01	387,16	5.674,38	1,67	1.000	-0,72	-0,01	167.233
Philipina	43,58	272,02	2.790,38	4,11	1.000	3,46	-1,61	83.187
Vietnam	21.195,00	170,56	1.901,70	6,03	500.000	6,64	NA	20.900***
Kamboja	4.069,70	16,66	1.016,41	4,65	100.00	-8,60	NA	3.732***

Sumber: www.imf.org; Bank Indonesia, www.bi.go.id; dan Bloomberg, www.bloomberg.com, 2014.

Keterangan:

* Data tahun 2013.

** Cadangan sampai bulan November 2013.

*** Cadangan sampai bulan Desember 2012.

adanya keterbatasan jumlah digit pada aplikasi transaksi keuangan saat ini, sehingga pemerintah juga mengalami kesulitan dalam bertransaksi. Transaksi pemerintah yang dilakukan berjumlah triliunan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam satu transaksi, sehingga harus dipecah-pecah menjadi beberapa transaksi (Kementerian Keuangan, 2014). Kondisi ini tentu saja akan membutuhkan waktu transaksi yang lebih lama dan juga menimbulkan adanya potensi kesalahan dalam bertransaksi.

3. Mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015

Indonesia akan menghadapi suatu liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN yang sering disebut istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Liberalisasi perdagangan ini diharapkan dapat menciptakan peluang pasar yang lebih besar dibandingkan sewaktu perdagangan dunia masih terbelah-belah karena proteksi yang diterapkan di banyak negara terhadap produk-produk impor (Tambunan, 2013). Selain itu, pembentukan integrasi ekonomi ini diharapkan akan memberi manfaat seperti mendorong berkembangnya industri lokal, peningkatan manfaat perdagangan melalui perbaikan *terms of trade*, dan mendorong efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi (Meier, 1995). Dengan MEA tahun 2015, maka ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global (Bank Indonesia, 2009).

Kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini dapat dikategorikan sebagai ekonomi yang cukup kuat untuk suksesnya pelaksanaan MEA di tahun

2015. Namun demikian, nilai mata uang Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi diantara negara kawasan ASEAN yang menyebabkan nilai tukar rupiah belum dipandang setara dengan mata uang negara kawasan. Selain itu, nilai tukar Indonesia jika dikonversikan ke USD juga termasuk yang terkecil. Jika dibandingkan dengan Vietnam dan Kamboja, fundamental ekonomi Indonesia sesungguhnya masih lebih baik dibandingkan kedua negara tersebut, namun dalam hal denominasi mata uang, Indonesia dipersepsikan setara dengan kedua negara tersebut. Penyederhanaan tersebut juga diharapkan akan semakin mempermudah transaksi perdagangan, baik barang maupun jasa, dengan negara kawasan ASEAN.

B. Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia

Salah satu syarat yang diperlukan dalam rangka mempertimbangkan dilaksanakannya program redenominasi adalah kondisi perekonomian negara yang stabil dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Agar pelaksanaan redenominasi tidak memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian Indonesia, maka perlu dilakukan pengamatan terhadap stabilitas fundamental ekonomi. Kesiapan suatu negara dalam melaksanakan redenominasi akan tercermin pada indikator makroekonominya. Pada Tabel 5 digambarkan kondisi makroekonomi Indonesia.

Berdasarkan data indikator makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir, secara umum kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya kebijakan redenominasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup kondusif meskipun terjadi tren perlambatan sebagai akibat dari adanya

Tabel 5. Indikator Makroekonomi Indonesia

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	6,22	6,49	6,26	5,78	5,12*
Inflasi (Persen)	6,96	3,79	4,30	8,38	3,99**
PDB Nominal (miliar USD)	657,37	845,52	876,96	868,53	213,86*
Defisit Fiskal/PDB Persen)	-0,70	-1,10	-1,90	-2,33	-2,40***
Neraca Berjalan/PDB Persen)	0,88	0,20	-2,70	-3,30	-4,30*
Nilai Tukar (Rp/USD)	9.087	8.779	9.384	10.459	11.600***
Cadangan Devisa (miliar USD)	96,21	110,12	112,78	99,39	110,51****
Suku Bunga Kebijakan Persen)	6,57*****	4,84	3,19	4,42	6,00 ^s

Sumber: BPS, www.bps.go.id; Kementerian Keuangan, Nota Keuangan dan RAPBN 2015; dan Bank Indonesia, www.bi.go.id, 2014.

Keterangan:

* Data sampai kuartal II-2014.

** Inflasi Agustus 2014.

*** Asumsi makro APBNP 2014.

**** Cadangan Devisa sampai Juli 2014.

***** Mulai tahun 2011 menggunakan suku bunga SPN 3 bulan.

kontraksi pertumbuhan ekspor. Ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti batu bara, *crude palm oil* (CPO), dan mineral mengalami penurunan seiring dengan melambatnya pertumbuhan di negara berkembang dan penerapan Undang-Undang Minerba. Selain itu juga pemulihan ekonomi global yang tidak secepat perkiraan dan harga komoditas global yang mengalami penurunan turut memberikan efek perlambatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Laju inflasi di Indonesia berdasarkan tingkat keparahannya, masuk ke dalam kategori inflasi tingkat ringan dari empat kategori yakni, inflasi ringan, sedang, inflasi berat dan hiperinflasi. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat inflasi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir yang berada di bawah 10 persen (Eko, 2009). Laju inflasi di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan dan energi. Laju inflasi yang berfluktuasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 disebabkan antara lain karena (a) adanya gangguan pasokan dan arus distribusi bahan pangan sebagai dampak serangkaian bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah sentra produksi bahan pangan nasional, (b) peningkatan harga komoditas energi dan bahan pangan di pasar internasional, dan (c) adanya ketegangan politik di beberapa negara produsen minyak dunia di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang menambah tekanan terhadap perkembangan harga minyak dunia di tahun 2012, sehingga memberikan dampak pada peningkatan inflasi dalam negeri. Selain itu, adanya penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) dan rencana penyesuaian harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi ikut menjadi penyebab meningkatnya laju inflasi. Hingga

akhir Juli 2014, laju inflasi mencapai 2,94 persen (*year to date/ytd*) atau 4,53 persen (*yoy*). Namun demikian, diperkirakan masih akan mengalami tekanan pada semester II tahun 2014 seiring dengan keputusan pemerintah untuk melaksanakan beberapa kebijakan harga di bidang energi, terutama penyesuaian TTL dan pengurangan secara bertahap subsidi listrik bagi kelompok dengan daya tertentu. Namun demikian, kinerja pemerintah dalam 5 tahun terakhir dapat dinilai cukup baik dalam mempertahankan inflasi tetap berada dalam 1 digit.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai tukar rupiah berfluktuasi terhadap nilai mata uang USD dengan kecenderungan terus menurun. Fluktuasi pergerakan nilai tukar rupiah ini banyak dipengaruhi oleh kekhawatiran pelaku pasar terhadap kondisi perekonomian dunia yang terkena dampak krisis ekonomi di Amerika Serikat serta proses pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa yang berjalan relatif lambat. Kinerja nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan mengalami tekanan sepanjang tahun 2014-2015, seiring dengan beberapa indikator eksternal dan domestik yang masih relatif lemah. Dari sisi eksternal, perekonomian AS, Eropa, serta India diperkirakan tumbuh positif sehingga diharapkan dapat membantu proses pemulihan ekonomi dunia. Meskipun demikian adanya kebijakan *tapering off* dan rencana peningkatan suku bunga acuan di Amerika Serikat dikhawatirkan akan mendorong ketatnya likuiditas global karena adanya *rebalancing portfolio* dari negara berkembang ke negara maju. Dari sisi domestik, tekanan terhadap kinerja nilai tukar rupiah masih bersumber dari potensi defisit APBN dan defisit neraca transaksi berjalan yang semakin hari semakin melebar, akibat dari impor

Tabel 6. Sasaran Besaran Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019

Indikator Makroekonomi	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PDB Nominal (Rp triliun)	10.302	11.581	13.092	14.857	16,791	18.995
Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,50	5,80	6,40	7,00	7,40	7,90
Inflasi (Persen)	4,50	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50
Nilai tukar (Rp/USD)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Suku bunga (Persen)	6,00	6,00	6,20	6,20	6,20	6,20
Harga minyak mentah (USD/barel)	105	100	100	100	100	100

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.

migas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perbaikan kinerja ekspor juga belum secepat tahun 2010 dan masih relatif rendahnya harga komoditas.

Sementara itu, kondisi cadangan devisa Indonesia saat ini masih dalam keadaan baik dan cukup sehat. Meskipun di tahun 2013 cadangan devisa Indonesia sempat tergerus ke level 92 miliar USD akibat terjadinya aliran dana keluar (*capital outflow*) dan permintaan valas dalam jumlah besar akibat isu pengurangan stimulus moneter di Amerika Serikat. Mulai dari pertengahan tahun 2013, cadangan devisa menunjukkan tren peningkatan, di mana hingga Juli 2014 cadangan devisa sudah kembali ke level 110,5 miliar USD atau setara dengan 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah (Bank Indonesia, 2014a).

Outlook perekonomian ke depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat pada tahun 2015 yang disebabkan investasi yang meningkat seiring mulai adanya kepastian dan berjalannya program-program kerja pemerintah baru, kinerja ekspor dan impor yang terus membaik, dan konsumsi rumah tangga yang masih tetap tinggi. Selain itu juga diharapkan terjadi perbaikan-perbaikan pada indikator makro ekonomi lainnya sejalan dengan perbaikan ekonomi global. Pada Tabel 6 disajikan sasaran ekonomi makro dalam 5 tahun mendatang.

C. Implikasi Penerapan Redenominasi

1. Implikasi Positif yang Diharapkan

Penerapan redenominasi diharapkan dapat memberikan implikasi yang positif bagi bangsa Indonesia. Adapun implikasi positif yang diharapkan dari penerapan kebijakan redenominasi ini dikategorikan kedalam beberapa sasaran, yaitu:

a. Bagi negara

Pelaksanaan kebijakan redenominasi ini diharapkan akan dapat memberikan implikasi positif bagi Indonesia, dalam hal:

1) Meningkatkan kredibilitas rupiah

Redenominasi akan membuat pecahan mata uang rupiah menjadi sederhana. Hal ini akan memfasilitasi kesetaraan kredibilitas rupiah dibandingkan dengan mata uang negara lain di kawasan yang selanjutnya akan membangun kebanggaan masyarakat terhadap mata uang rupiah. Meningkatnya kebanggaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, sehingga potensi masyarakat untuk mensubstitusikan mata uangnya ke mata uang negara lain yang dipandang lebih aman menjadi rendah.

2) Menghemat biaya pencetakan uang

Dengan pelaksanaan redenominasi diharapkan penggunaan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran akan banyak beralih dengan menggunakan mata uang dalam bentuk koin. Sebagai contoh uang pecahan Rp1.000 saat ini yang dicetak dalam bentuk kertas akan digantikan dengan Rp1 dalam bentuk koin. Hal ini akan berdampak pada penghematan dalam pencetakan uang karena masa edar uang dalam bentuk koin umumnya relatif lebih lama dibandingkan dengan uang kertas. Perbandingan masa edar uang kertas dengan uang logam adalah 1 dibanding 15, artinya jika uang kertas usianya satu tahun harus diganti, maka untuk uang logam masa pakainya bisa sampai 15 tahun. (Wibowo, 2010)

3) Mempermudah transaksi pemerintah

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa denominasi besar saat ini menyulitkan bagi pemerintah untuk melakukan transaksi. Transaksi pemerintah yang bernilai triliunan tidak dapat diselesaikan dalam 1 transaksi sehingga waktu transaksi lebih lama dan berpotensi terjadinya kesalahan dalam transaksi. Dengan adanya redenominasi diharapkan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diselesaikan dalam 1

kali transaksi sehingga lebih cepat dan mengurangi potensi kesalahan dalam bertransaksi.

b. Bagi pelaku usaha

Implikasi positif yang diharapkan terjadi bagi pelaku usaha dengan diterapkannya kebijakan redenominasi adalah *pertama*, meningkatkan efisiensi proses *input* data, pengelolaan *database* dan pelaporan data. Bagi pelaku usaha pelaksanaan redenominasi akan mengurangi pencatatan pembukuan atau akuntansi, pencatatan transaksi, penyimpanan data historis transaksi, dan mempermudah penyajian dalam laporan keuangan. Dengan denominasi yang lebih sederhana akan mengurangi waktu operasional dan potensi kesalahan dalam proses pencatatan transaksi, penyimpanan data, dan penyajian laporan. *Kedua*, mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi. Bagi pelaku usaha, khususnya yang menyediakan layanan jasa keuangan, dengan adanya penyederhanaan nominal rupiah ini maka kebutuhan kustomisasi jumlah *digit field* dan *column* dalam *database* yang digunakan tidak akan diperlukan lagi. Selain itu pula, dengan penyederhanaan digit rupiah ini juga akan mengurangi kebutuhan penyimpanan data transaksi dan mempercepat transaksi yang menggunakan jaringan komunikasi data.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya denominasi yang lebih sederhana, diharapkan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Masyarakat dapat bertransaksi dengan lebih mudah, karena angka yang dihitung lebih sederhana. Selanjutnya risiko terhadap kerusakan uang seperti tersobek, lusuh, terbakar, terkena air, yang menyebabkan uang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi dapat diminimalisir mengingat penggunaan mata uang akan banyak menggunakan pecahan koin yang lebih tahan terhadap hal-hal tersebut. Selain itu praktik denominasi sederhana dalam bertransaksi sehari-hari juga mendukung proses belajar dan mengajar pada pendidikan dasar. Materi yang dipelajari di sekolah saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga transaksi tunai dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan jumlah digit yang besar. Untuk itu redenominasi rupiah memungkinkan terciptanya sinkronisasi antara pelajaran/teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, sehingga memberikan kemudahan bagi para pelajar pada level pendidikan dasar dalam mempelajari konsep penghitungan.

2. Potensi implikasi negatif

Meskipun diharapkan mampu memberikan implikasi yang positif bagi perekonomian Indonesia, penerapan redenominasi juga memiliki potensi risiko yang harus diantisipasi. Adapun potensi risiko tersebut adalah:

a. Peningkatan inflasi akibat pembulatan harga yang berlebihan

Program redenominasi ini akan berpotensi terjadinya pembulatan harga ke atas dengan alasan untuk mempermudah transaksi oleh pelaku usaha. Meskipun dalam *draft* yang diusulkan pemerintah ke DPR RI mengatur tentang tata cara pembulatan, namun pembulatan yang dilakukan oleh pelaku usaha berpotensi berlebihan karena adanya dampak *money illusion* dari program redenominasi ini. Sebagai contoh harga mie instan 75 gram saat ini adalah Rp1.500. Setelah adanya redenominasi harga mie instan tersebut akan menjadi Rp1,5. Dengan alasan untuk mempermudah transaksi, pelaku usaha berpotensi untuk dilakukan pembulatan menjadi Rp2. Dengan pembulatan tersebut mengakibatkan terjadi kenaikan harga mie instan sebesar 29 persen. Jika hal ini terjadi pada seluruh produk barang dan jasa maka akan mendorong terjadinya inflasi yang tinggi. Namun dengan adanya kewajiban pencantuman 2 harga yang bersamaan selama masa transisi, hal tersebut diharapkan dapat dihindari.

b. Pengeluaran biaya yang besar oleh pemerintah

Kesuksesan pelaksanaan program redenominasi ini akan sangat bergantung pada keberhasilan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjadi kebingungan dalam bertransaksi. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan kondisi kepulauan maka ongkos sosialisasi yang dibutuhkan akan sangat besar. Selain itu juga biaya yang sangat besar akan diperlukan mulai dari persiapan, kajian akademik, studi banding, RUU, UU, sosialisasi, sampai ke implementasi, pengawasan dan pemberian sanksi. Yang tidak kalah menimbulkan biaya besar adalah biaya pencetakan uang baru untuk menggantikan uang lama yang beredar di masyarakat.

c. Penolakan sebagian masyarakat dan menambah beban pelaku usaha

Rencana program redenominasi meskipun bertujuan untuk kepentingan nasional, namun tetap berpotensi adanya penolakan dari sebagian kalangan masyarakat. Saat ini masyarakat sudah sangat terbiasa dalam penggunaan denominasi besar karena merasa menghitung uang ratusan jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dengan banyak sen. Denominasi

besar juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat sehingga istilah menjadi jutawan merupakan suatu impian yang dapat mudah diwujudkan. Khusus bagi pelaku usaha, penerapan program redenominasi ini akan memberikan beban tambahan, karena menimbulkan kewajiban pencantuman 2 harga yang berlaku selama masa transisi redenominasi. Selain itu juga perlu adanya penyesuaian pada dokumen-dokumen dan biaya-biaya lainnya yang terpaksa harus ditanggung oleh setiap lapisan pelaku bisnis.

d. Efek psikologis

Pelaksanaan redenominasi rupiah berpotensi menimbulkan efek psikologis berupa ketakutan dan keraguan bagi pelaku usaha. Produsen untuk waktu tertentu akan menahan menjual produknya karena mempunyai perasaan psikologis uang yang mereka terima sedikit dan akan terjadi kecenderungan menaikkan harga jual yang pada akhirnya dapat memicu inflasi. Selain itu juga akan menimbulkan berbagai keraguan dalam melakukan transaksi, baik transaksi tunai maupun transaksi kredit, pada akhirnya bisa menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu pengalaman sanering di masa lalu yang dirasakan para pelaku usaha masih memberikan trauma mengingat masih banyak dari pelaku usaha saat ini yang pernah mengalami peristiwa sanering tersebut.

e. Potensi perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen

Kebijakan redenominasi ini berpotensi menimbulkan adanya perselisihan khususnya bagi transaksi-transaksi yang telah terikat dengan perjanjian. Dengan adanya perubahan denominasi ini dikhawatirkan pengikatan transaksi dalam suatu perjanjian akan merugikan salah satu pihak yang berujung pada perselisihan. Dengan adanya peraturan perundangan yang mengatur aspek teknis redenominasi, hal tersebut tentunya bisa dihindari.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam melakukan kegiatan bertransaksi bagi masyarakat dibutuhkan suatu denominasi mata uang yang baik. Sementara, denominasi rupiah saat ini sudah cukup besar, nomor tiga terbesar di dunia, dan dirasa mulai merepotkan dalam pelaksanaan kegiatan bertransaksi. Salah satu alternatif solusi untuk mendapatkan denominasi mata uang yang baik adalah dengan melakukan redenominasi atau penyederhanaan denominasi mata uang. Urgensi perlu dilakukannya redenominasi rupiah saat ini adalah telah terjadinya inefisiensi pada

perekonomian. Inefisiensi di sini adalah pada waktu dan biaya transaksi yang dibutuhkan lebih besar, adanya kebutuhan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran nontunai, dan meningkatkan biaya pengadaan uang baru. Selain masalah efisiensi, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pelaksanaan redenominasi. Kendala teknis tersebut terjadi karena adanya keterbatasan jumlah digit pada pompa bensin, argo taksi, komputer, dan lain-lain. Integrasi ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 juga dapat dijadikan momentum untuk dilaksanakannya redenominasi agar terjadi kesetaraan mata uang di kawasan ASEAN.

Dilihat dari kondisi fundamental ekonomi, secara umum kondisi perekonomian Indonesia saat ini cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya kebijakan redenominasi. Hal ini tercermin dari inflasi yang terjaga di level 1 digit dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, cadangan devisa yang cukup dan sehat, nilai tukar yang tetap terjaga meskipun sedikit mengalami fluktuasi, dan indikator makroekonomi lainnya. Jika dibandingkan dengan kondisi makroekonomi negara-negara yang telah berhasil melaksanakan redenominasi, maka Indonesia mempunyai peluang keberhasilan redenominasi yang baik.

Penerapan redenominasi diharapkan akan memberikan implikasi positif bagi bangsa ini. Bagi pemerintah, diharapkan redenominasi dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Bagi pelaku usaha, redenominasi diharapkan akan meningkatkan efisiensi proses *input* data, pengelolaan *database* dan pelaporan data serta mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan perangkat lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi. Bagi masyarakat, redenominasi diharapkan dapat mempermudah dalam bertransaksi, mengurangi risiko kerusakan pada uang, dan juga dapat mendukung proses belajar dan mengajar pada pendidikan dasar. Namun demikian, perlu juga diwaspadai dampak negatif yang mungkin bisa timbul juga akan cukup besar seperti meningkatnya inflasi sebagai dampak pembulatan yang berlebihan, biaya yang tinggi untuk legislasi dan sosialisasi, adanya penolakan bagi sebagian masyarakat, munculnya efek psikologis dan potensi perselisihan. Beberapa dampak negatif tersebut bisa ditekan melalui peraturan perundangan pada level teknis.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melihat kesiapan Indonesia yang tercermin dari indikator makroekonomi, pelaksanaan redenominasi

di Indonesia sesungguhnya perlu segera dilakukan. Namun untuk menghindari terjadinya implikasi negatif akibat pelaksanaan redenominasi tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, yaitu (1) pemerintah bersama Bank Indonesia perlu melakukan sosialisasi yang masif agar informasi tentang program redenominasi dapat tersampaikan keseluruh pelosok Indonesia. Dalam rangka sosialisasi tersebut pemerintah dan Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, dunia pendidikan, dan instansi-instansi lainnya yang mendukung penyebaran informasi secara merata ke seluruh Indonesia, (2) tahapan pelaksanaan redenominasi perlu diatur sebaik mungkin. Khususnya pada masa persiapan dan masa transisi perlu dipersiapkan waktu yang cukup panjang agar masyarakat terbiasa dengan istilah redenominasi di masa persiapan, dan masyarakat terbiasa menggunakan pecahan setelah redenominasi di masa transisi. Selain itu juga dengan waktu yang cukup panjang di masa transisi tidak akan membebani pemerintah untuk segera mengganti uang lama sebelum redenominasi dengan uang baru setelah redenominasi, dan (3) selama masa kebijakan redenominasi, Bank Indonesia harus memastikan ketersediaan pecahan mata uang baru setelah redenominasi cukup beredar di masyarakat. Masyarakat maupun pelaku usaha tidak boleh mengalami kesulitan dalam memperoleh uang rupiah baru mengingat salah satu kegagalan kebijakan redenominasi di beberapa negara adalah masyarakatnya kesulitan untuk mendapatkan uang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia. (2009). *Kajian mengenai rumusan standar minimum laporan keuangan dan business plan untuk UMKM: Persiapan Bank Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2005). *Sejarah Bank Indonesia periode II: 1959-1966, Bank Indonesia pada masa ekonomi terpimpin*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2014a). *Dinamika dan proyeksi ekonomi 2014-2015, kebijakan Bank Indonesia serta implikasi terhadap keuangan Bank Indonesia 2014-2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Eko, Y. (2009). *Ekonomi 1: Untuk SMA dan MA kelas X*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.

Lipsey, R. G. & Steiner, P. O & Purvis, D. D & Courant, P. N. (1995). *Pengantar ekonomi makro*. (A. Jaka Wasana, Terjemahan). Jakarta: Binarupa Aksara.

Meier, G. M. (1995). *Leading issues in economic development*. New York: Oxford University Press.

Suryabrata, S. (2013). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Dogarawa, A. B. (2007). The economics of currency redenomination: An appraisal of CBN redenomination proposal. *MPRA Paper No. 2319*. Diperoleh tanggal 10 Juli 2014, dari <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23195/>.

Priyono. (2013). Redenomination: Between hope and reality (the study of the implementation of redenomination in Indonesia). *International Journal of Business and Management Invention*, 2(4), pp. 36-40.

Somoye, R. O. C. and Onakoya, A. B. (2013). Macroeconomic implication of currency management in Nigeria: A synthesis of the literature. *British Journal of Economics, Finance and Management Sciences*, 8 (1), pp. 12-28.

Tambunan, T. (2013). Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan tantangan bagi UMKM di Indonesia. *Policy Paper No. 15 Advancing Indonesia's Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme*, pp. 1-20.

Sumber Digital

- Kurniawan, T. (2013). DPR bentuk pansus RUU Redenominasi Rupiah. Diperoleh tanggal 28 Desember 2014, dari <http://www.antaraneews.com/berita/381984/dpr-bentuk-pansus-ruu-redenominasi-rupiah>.
- Latif, S. (2011). Susah gampang meringkas nilai uang. Diperoleh tanggal 15 Juli 2014, dari <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/272856-susah-gampang-meringkas-nilai-uang>.
- Metrotvnews.com (2013). Menkeu: Redenominasi perlu karena rupiah lemah. Diperoleh tanggal 28 Oktober 2014, dari <http://microsite.metrotvnews.com/metronews/video/2013/01/23/2/169420/Menkeu-Redenominasi-Perlu-karena-Rupiah-Lemah>.
- Purwanto, D. (2013). Apa dampak jika Redenominasi tidak Dilakukan. Diperoleh tanggal 30 September 2014, dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/23/11130521/Apa.Dampak.jika.Redenominasi.Tidak.Dilakukan>.

- Redenominasirupiah.com. (2013a). Redenominasi rupiah di Indonesia. Diperoleh tanggal 14 Agustus 2014, dari <http://www.redenominasirupiah.com/redenominasi-rupiah-di-indonesia/>.
- Redenominasirupiah.com. (2013b). Perbedaan redenominasi rupiah dengan sanering rupiah. Diperoleh tanggal 15 Agustus 2014, dari <http://www.redenominasirupiah.com/perbedaan-redenominasi-rupiah-dengan-sanering-rupiah/>.
- Serdengecti, S. (2004). Redenomination of Turkish Lira by dropping six zeros. Diperoleh tanggal 15 Juli 2014, dari <http://tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/7e506afd-36a4-4cc8-bec8-ce465e4de6b4/04-08.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7e506afd-36a4-4cc8-bec8-ce465e4de6b4>.
- Siahaan, L. A. (2014). Uang beredar selama Ramadhan dan lebaran diprediksi capai Rp 580,3 Triliun. Diperoleh tanggal 10 Juli 2014, dari .
- Suruji, A., Astono, B., Muhtadi, D., Irwanto, F., Pambudy, N. M., Gero, P. P., Saragih, S., Samhadi, S. H., Tjahjono, S., Gunawan, T., Hadi, Y. U., dan Arika, Y. (1998). Laporan akhir tahun bidang ekonomi, krisis ekonomi 1998, tragedi tak terlupakan. Diperoleh tanggal 15 Agustus 2014, dari http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Krisis_ekonomi.htm.
- Tarhan, S. (2006). The new Turkish Lira (YTL). Diperoleh tanggal 15 Juli 2014, dari <http://www.econ.umn.edu/~dmiller/The%20New%20Turkish%20Lira.pdf>.
- Waas, R. (2014a). 2015, BI proyeksikan pertumbuhan peredaran uang capai 15%. Diperoleh tanggal 7 Oktober 2014, dari <http://finansial.bisnis.com/read/20140514/11/227878/2015-bi-proyeksikan-pertumbuhan-peredaran-uang-capai-15>.
- Waas, R. (2014b). BI: uang kartal 2013 meningkat 13,6 persen. Diperoleh tanggal 6 Juni 2014, dari <http://skalanews.com/berita/detail/164822/Peredaran-Uang-Kartal-2013-Meningkat-13>.
- Wibowo. (2010). Uang baru Rp1.000 bisa untuk telepon koin. Diperoleh tanggal 10 Oktober 2014, dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/165827-uang-baru-rp1-000-bisa-untuk-telepon-koin>.
- Sumber Lain**
- Alie, M. (2013). Kegiatan DPR RI minggu keempat Juni 2013. *Buletin Parlemenaria Nomor 776/VI/2013*.
- Bank Indonesia. (2014b). Redenominasi bukan sanering. Paper dipresentasikan di rapat kunjungan kerja Pansus RUU Perubahan Harga Rupiah ke Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Isarescu, M. (2004). Denominarea monedei naționale. Paper dipresentasikan di Redenomination of the Leu From the Perspective of Romanian Banks, Bucharest.
- Karimi, S. (2014). Redenominasi rupiah tidak relevan dengan penguatan ekonomi Indonesia. Paper dipresentasikan dalam FGD dengan akademisi di Universitas Andalas pada kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU Perubahan Harga Rupiah ke Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Kementerian Keuangan. (2014). Konsultasi publik perubahan harga rupiah. Paper dipresentasikan di rapat kunjungan kerja Pansus RUU Perubahan Harga Rupiah ke Provinsi Sumatera Barat, Padang.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Pembahasan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2015. Paper dipresentasikan di rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah, Jakarta.
- Mosley, L. (2005). Dropping zeros, gaining credibility? currency redenomination in developing nations. Paper dipresentasikan di *Annual Meetings of the American Political Science Association*, Washington, D. C.
- Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2015. (2014) Jakarta: Republik Indonesia.
- Thalo, N. (2010). Manfaat dan biaya redenominasi rupiah. *Update Indonesia: Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial*, Volume V, No. 5.